

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai representasi komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023 dengan menitikberatkan pada kebijakan anggaran dan efektivitas kinerja anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan informan kunci dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023 secara administratif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tingkat realisasi pendapatan yaitu Rp. Rp. 2.842.021.968.214 dan belanja daerah yaitu Rp. 2.832.406.522.579. Namun demikian, efektivitas kinerja anggaran belum sepenuhnya optimal karena masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat serta struktur belanja yang didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut membatasi kemampuan APBD dalam mendorong pembangunan dan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, dinamika politik lokal, keterbatasan kapasitas fiskal, serta belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran turut memengaruhi capaian kinerja program pembangunan. Kondisi ini menyebabkan implementasi APBD lebih menonjolkan keberhasilan administratif dibandingkan pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan anggaran yang lebih realistis, berorientasi pada hasil, serta didukung oleh peningkatan kemandirian fiskal daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan APBD di masa mendatang.

Kata Kunci: APBD, Implementasi Kebijakan, Efektivitas Anggaran

ABSTRACT

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a strategic instrument in the implementation of regional development policies. In the context of regional autonomy, the APBD functions not only as a financial document but also as a representation of the local government's commitment to addressing the social and economic needs of the community. This study aims to analyze the implementation of the 2023 Kuningan Regency APBD, emphasizing budget policy and the effectiveness of budget performance. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method and is analyzed using the Van Horn and Van Meter policy implementation theory. Data collection was conducted through interviews, documentation, and literature studies with key informants from the Kuningan Regency Regional Government Budget Team (TAPD). The results of the study indicate that the implementation of the 2023 Kuningan Regency Regional Budget (APBD) has been administratively carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, with a revenue realization rate of Rp. 2,842,021,968,214 and regional expenditure of Rp. 2,832,406,522,579. However, the effectiveness of budget performance has not been fully optimal due to the still low Regional Original Income (PAD), high dependence on central transfers and a spending structure dominated by operational expenditures rather than capital expenditures. These conditions limit the ability of the APBD to encourage development and regional fiscal independence. In addition, local political dynamics, limited fiscal capacity, and suboptimal synchronization between budget planning and implementation also affect the achievement of development program performance. These conditions cause the implementation of the APBD to emphasize administrative success more than the achievement of sustainable development results. Therefore, this study emphasizes the need to strengthen budget policies that are more realistic, results-oriented, and supported by increased regional fiscal independence to improve the quality of APBD management in the future.

Keywords: APBD, Policy Implementation, Budget Effectiveness